

## Daftar Pustaka

### A. Literatur:

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana (Cetakan 2)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Gravindo.
- Departemen P & K. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dillah, Phillip dan Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Delik-Delik Khusus*. Bandung : Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-7*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Alumni
- Rusdianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan*

- Penerapannya*. Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Bandung : PT Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Subekti, R.. 2008. *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Syamsudin, M. 2008. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo.

#### **B. Jurnal Ilmiah:**

- H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility, Essay in The Philosophy of Law*, ed. I, New York: Oxford University Press Inc., 2008-xxxvi.  
Dapat diakses di:  
<https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199534777.001.0001/acprof-9780199534777> Diakses pada tanggal: 18 Agustus 2021
- Dewi & Arifin, *Emancipation and Legal Justice, Potrait of Woman's Legal Protection in Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, 7(1), 2019, hal. 101–114, Tersedia di: 10.15408/jchv7i1.10261, diakses pada tanggal: 25 September 2021
- Supanto. *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 20(3), 2004, hal. 288–310, Tersedia di:  
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i3.371>, diakses pada tanggal:

25 September 2021

A, Möller, *Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post- traumatic stress disorder and severe depression*, Stockholm: Department of Clinical Science and Education, Karolinska Institute, 2017, tersedia di website <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28589545> , diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 11.03 WIB.

Laini Nur Anisa, *Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO)*, 1(2), 2021, hal. 151-163, Tersedia di: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16544>, diakses pada tanggal: 10 Mei 2022

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undanag Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum